

Pelanggaran Prinsip Kerjasama Maksim Kuantitas dalam Acara Rakyat Bersuara

M. Alfian Fatkhur Rohman¹

M. Imron Abadi²

I Wayan Letreng³

¹²³ Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan
Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

¹ alfanputraa6570tab@gmail.com

² im.abadi@yahoo.com

³ wletreng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memotivasi gambaran secara obyektif tentang pelanggaran prinsip kerjasama pada acara *Rakyat Bersuara*, khususnya pada maksim kuantitas. Fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana pembawa acara dan narasumber menyampaikan informasi secara berlebihan atau justru tidak memberikan informasi yang cukup sesuai konteks pembicaraan. Jenis penelitiannya deskriptif kualitatif untuk menguraikan data. Data diambil dari transkrip percakapan pada acara rakyat bersuara episode “Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa yang Dituju”. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam dialog publik di media televisi, pelanggaran maksim kuantitas sering terjadi karena berbagai faktor, seperti strategi komunikasi dan kepentingan narasumber dalam berpendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tuturan yang tidak memenuhi prinsip maksim kuantitas yaitu Informasi yang diucapkan tidak boleh melebihi informasi sebenarnya, sehingga pesan yang disampaikan kurang efektif dan menimbulkan multitafsir.

Kata Kunci: *prinsip kerjasama, maksim kuantitas, pragmatik, komunikasi politik, harun maksiku*

Abstract

This study aims to analyze and objectively describe violations of the cooperative principle in the television program Rakyat Bersuara, particularly focusing on the maxim of quantity. The research is intended to examine how the host and guests either provide excessive information or insufficient details in relation to the conversational context. Using a descriptive qualitative approach, the study elaborates on data collected from transcripts of the Rakyat Bersuara episode titled “Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa yang Dituju”. The findings emphasize that, in public dialogue on television, violations of the quantity maxim frequently occur due to various factors, such as communication strategies and the speakers’ vested interests in expressing their opinions. The results indicate that several utterances do not comply with the quantity maxim, where the information delivered either exceeds or lacks the necessary content, leading to ineffective message delivery and potential ambiguity.

Keywords : *cooperative principle, quantity maxim, pragmatics, political communication, Harun Masiku*

Pendahuluan

Bahasa merupakan alat komunikasi, Melalui bahasa seseorang akan terlihat budi pekertinya. Sehingga inilah yang menjadi alasan setiap orang wajib menguasai keterampilan berbahasa agar dapat mengemukakan pikiran dan gagasan dengan santun. Tujuan seseorang untuk berbahasa selain berkomunikasi seseorang juga dapat

menyampaikan gagasan dan pemikiran, Sehingga inilah yang menjadi alasan seseorang harus menguasai ilmu berbahasa agar dapat menyampaikan ide, gagasan, konsep pikiran dan pemikiran, Bahasa juga dapat menggambarkan sifat dan perilaku seseorang meskipun menurut beberapa pendapat sering membicarakan terkait politik dan menganggap adanya pelanggaran berbahasa sebagai bentuk kewajaran karena bisa di jadikan sebagai strategi politi seperti halnya digunakan untuk berdebat. Pelanggaran berbahasa ini tentunya bagi sebagian orang menilai wajar memperlihatkan kelemahan lawan debat. Namun hal ini akan berlawanan dengan konsep dari tujuan berbahasa. (Pereplyotchik 2022).

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, ide, dan gagasan. Dalam proses komunikasi, terdapat berbagai prinsip yang harus diikuti agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Salah satu teori yang berperan penting dalam studi komunikasi adalah Teori Prinsip Kerja Sama yang dikemukakan oleh H.P. Grice pada tahun 1975. Teori ini menekankan bahwa dalam percakapan, penutur dan mitra tutur harus bekerja sama agar komunikasi berlangsung efektif. Prinsip ini terdiri dari empat maksim, yaitu *maksim kuantitas*, *maksim kualitas*, *maksim relevansi*, dan *maksim pelaksanaan*. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga kejelasan dan tujuan dalam komunikasi, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan menghindari kesalah pahaman (Slutskiy 2021)

Kajian mengenai pelanggaran maksim kuantitas ini termasuk dalam bidang pragmatik, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks penggunaannya. Pragmatik menitikberatkan pada bagaimana makna tuturan dipahami berdasarkan situasi, tujuan, serta hubungan antara penutur dan pendengar. Melalui pendekatan pragmatik, analisis tidak hanya berfokus pada struktur bahasa, tetapi juga pada maksud dan implikasi yang muncul dalam percakapan.

Bentuk kerjasama yang dimaksud adalah prinsip kerja sama yang digagas oleh Grice. Prinsip kerjasama Grice ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tindakan penutur dan mitra tutur dalam suatu percakapan. Grice dalam Wijana (1996) mengatakan bahwa dalam melakukan prinsip kerjasama setiap penutur haruslah menerapkan 4 (empat) maksim percakapan di antaranya, yaitu: (1) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), (2) maksim kualitas (*maxim of quality*), (3) maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan (4) maksim pelaksanaan/cara (*maxim of manner*).

Fenomena pelanggaran maksim kuantitas dapat ditemukan dalam acara Rakyat Bersuara, sebuah program diskusi publik yang menghadirkan narasumber dengan pandangan berbeda untuk membahas isu-isu terkini. Episode “Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa yang Dituju?” menjadi menarik untuk diteliti karena terdapat banyak tuturan yang tidak memenuhi prinsip kerja sama, khususnya pada aspek kuantitas. Pelanggaran tersebut berdampak pada efektivitas komunikasi dan pemahaman audiens terhadap topik yang dibahas.

Dalam praktiknya, prinsip kerjasama ini sering kali dilanggar, terutama dalam diskursus publik seperti *talk show* atau acara diskusi di media massa. Salah satu contoh menarik dari pelanggaran prinsip kerjasama dapat ditemukan dalam acara Rakyat Bersuara episode Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa yang Ditulu. Episode ini menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki pandangan berbeda terkait kasus Harun Masiku, seorang politisi yang menjadi buronan dalam kasus korupsi. Dalam diskusi ini, terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama Grice, baik dalam bentuk informasi yang tidak memadai, penyampaian opini tanpa dasar yang jelas,

hingga upaya mengaburkan informasi dengan penggunaan bahasa yang tidak langsung. (Sinaga & Dahnilsyah 2018).

Pragmatik menurut Parere (2001) yakni ilmu yang mengkaji tentang pemakaian bahasa dalam berkomunikasi dan hubungan antar kalimat serta konteks, situasi yang diujarkan dalam kalimat tersebut. Melalui penjelasan para ahli, penelitian menyimpulkan bahwa ilmu pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dalam pemakaian serta makna yang dihasilkan oleh kalimat yang dapat diketahui konteksnya yang ada saat tuturan tersebut berlangsung. Maka dari itu pembahasan mengenai pragmatik untuk mengkaji diskusi dinilai cocok karena akan melihat layar belakang seseorang menggunakan bahasa yang dinilai yang dinilai melanggar aturan kerjasama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran maksim kuantitas dalam acara Rakyat Bersuara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pragmatik serta menjadi bahan evaluasi penggunaan bahasa dalam komunikasi publik, khususnya di media televisi.

Acara *Rakyat Bersuara* merupakan salah satu program diskusi publik yang ditayangkan di televisi dan menghadirkan berbagai narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Dalam setiap episodenya, acara ini membahas isu-isu sosial, politik, dan hukum yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Salah satu episode yang menarik perhatian adalah "Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa yang Dituju?" di mana terjadi perdebatan panjang antara pembawa acara dan narasumber terkait keberadaan dan penanganan kasus Harun Masiku. Percakapan dalam acara tersebut berlangsung secara intens, dengan gaya bahasa yang kadang berbelit-belit dan tidak langsung pada inti persoalan. Hal ini membuat sebagian informasi yang disampaikan menjadi berlebihan atau justru kurang jelas. Kondisi ini mencerminkan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama, khususnya pada maksim kuantitas, yang berdampak pada keefektifan komunikasi dan pemahaman audiens terhadap pesan yang ingin disampaikan.

Metode

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan pragmatik jenis penelitian kualitatif. Peneliti ingin mendeskripsikan secara detail bagaimana pelanggaran maksim kuantitas dalam acara Rakyat Bersuara. Pendekatan ini dipilih untuk agar memahami makna yang terdapat dalam tuturan secara mendalam tanpa menggunakan angka-angka statistik. Sumber data penelitian ini diambil dari transkrip percakapan acara Rakyat Bersuara episode "Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa yang Dituju?". pada episode ini dipilih karena di dalamnya banyak percakapan yang terlihat tidak sesuai dengan prinsip kerja sama, terutama maksim kuantitas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik simak, dengar dan catat Sugiyono (2017) sedangkan Sudayanto (2015) menyatakan bahwa teknik simak bebas libat cakap atau teknik simak dengar catat merupakan pengambilan data yang memposisikan peneliti tidak terlibat dalam dialog. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat tuturan penutur. teknik simak salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati atau menyimak secara langsung objek penelitian,

terutama dalam kajian bahasa, komunikasi, atau interaksi verbal, tanpa terlibat aktif dalam proses komunikasi tersebut.

1. Teknik dengar

Teknik dengar teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyimak pemakaian bahasa oleh penutur asli, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui rekaman) Pada praktiknya dapat digunakan Menyimak acara *talkshow*, seperti *Rakyat Bersuara* di televisi, untuk meneliti bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam ujaran. Merekam percakapan di lingkungan masyarakat untuk dianalisis struktur kalimatnya atau unsur sosiolinguistiknya. Meneliti intonasi, tekanan, atau gaya bahasa dalam tuturan tokoh masyarakat atau pejabat publik, Sudaryanto (2015)

2. Teknik siamak

Teknik catat salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat informasi penting dari berbagai sumber tertulis atau dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam studi pustaka maupun dalam pengumpulan data sekunder, dan sangat berguna untuk mengorganisasi data tanpa mengganggu sumber aslinya. (Margono 2010).

3. Teknik catat

Teknik catat ini diawali ditranskripsikannya terlebih dahulu data berupa dialog-dialog ke dalam bentuk tulisan setelah data terbentuk dalam tulisan dilakukan pencatatan terhadap data yang relevan dengan mencatat data, penulis juga mencatat konteks yang melingkupi data tersebut selanjutnya data akan ditulis ulang dan akan dimasukkan dalam bentuk tabel yang berisi:

Tabel 1. Tabel pedoman instrumen

No	Kategori	Indikator	Ciri-ciri

Hasil

Penelitian ini menganalisis pelanggaran prinsip kerjasama, khususnya maksimum kuantitas, dalam acara Rakyat Bersuara episode “Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa yang Dituju?”. Dari hasil analisis data transkrip percakapan, ditemukan 6 tuturan yang melanggar maksimum kuantitas. Pelanggaran tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Memberikan informasi berlebihan narasumber atau pembawa acara menyampaikan penjelasan yang terlalu panjang, berulang, dan melebihi informasi yang dibutuhkan oleh penanya atau audiens. Memberikan informasi yang kurang narasumber tidak memberikan jawaban secara lengkap atau hanya menjawab sebagian, sehingga tidak memenuhi harapan lawan bicara.

Hasil Data Pelanggaran Prinsip Kerjasama Maksim Kuantitas

Data 1

Boyamin : *iya kan ini kasus yang sekian lama dan justru saya 2020 awal itu juga sudah membuat sayembara iPhone seri terbaru untuk informasi Nurhadi dan Harun masiku, dan karena ndak terungkap-ungkap akhirnya Hadiah itu saya berikan juga kepada yang menemukan nurhati akhirnya dapat Dobel hadiahnya waktu itu tapi saya tetap masih berlaku Hadiah itu iPhone seri terbaru bagi yang memberikan informasi menjadikan Harun masiku tertangkap*

Sampai Nanti sampai tertangkap ada yang memberikan informasi kalau nanti seri 20 ya seri 20 (Rakyat Bersuara Episode Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju. Menit 07.02)

Dalam tuturan Boyamin yang, ***“saya tetap masih berlaku Hadiah itu iPhone seri terbaru bagi yang memberikan informasi menjadikan Harun Masiku tertangkap. Sampai nanti sampai tertangkap ada yang memberikan informasi. Kalau nanti seri 20 ya seri 20,”*** terdapat pelanggaran terhadap maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice. Pelanggaran ini terlihat dari adanya informasi yang disampaikan secara berlebihan dan tidak relevan dengan kebutuhan inti percakapan. Seharusnya, informasi mengenai hadiah cukup dijelaskan secara singkat dan langsung pada inti, misalnya hanya menyebut bahwa hadiah berupa iPhone diberikan kepada pihak yang berhasil memberikan informasi penangkapan Harun Masiku. Namun, Boyamin justru menambahkan keterangan yang terlalu jauh dengan mengatakan bahwa hadiah itu tetap berlaku hingga Harun Masiku tertangkap, bahkan menyebut kemungkinan hadiah berubah menjadi ***“seri 20”*** iPhone. Penyebutan tipe iPhone secara spekulatif dan berlebihan ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan percakapan, melainkan hanya memperluas topik secara tidak perlu. Hal ini menunjukkan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim kuantitas karena memberikan kontribusi informasi yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan dalam konteks komunikasi saat itu. Akibatnya, efektivitas komunikasi menjadi berkurang karena informasi yang seharusnya bersifat padat dan fokus justru menjadi melebar dan membingungkan.

Data 2

Boyamin : ***saya tanya mereka informasinya Bagaimana secara rahasia nanti saya berikan dulu zaman kasus nuradi kan juga begitu gitu dikasih juga dikasih gitu nah pada posisi inilah saya jengkel juga gitu Alasan saya kan tadi itu judulnya kan juga karena jengkel ini kan menjadi suatu yang e tanda kutip karena saya politisi Orde Baru DPRD solutan 97 jadi ini seperti dalam konteks gorengan politik menjadi sandera*** (Rakyat Bersuara Episode Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju. Menit 07.16)

Tuturan Boyamin yang ***“saya tanya mereka informasinya Bagaimana secara rahasia nanti saya berikan dulu zaman kasus nuradi kan juga begitu gitu dikasih juga dikasih gitu nah pada posisi inilah saya jengkel juga gitu Alasan saya kan tadi itu judulnya kan juga karena jengkel ini kan menjadi suatu yang e tanda kutip karena saya politisi Orde Baru DPRD solutan 97 jadi ini seperti dalam konteks gorengan politik menjadi sandera”*** nunjukkan frustrasi pribadi dan pengalaman dia di dunia politik yang bikin dia punya pandangan kritis soal kasus Harun Masiku. Kata “gorengan politik” sama “sandera” jelas bentuk kritik kalau kasus ini mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kalau kita hubungkan sama prinsip kerja sama Grice, ini ada indikasi pelanggaran maksim kuantitas juga. Boyamin ngomong panjang lebar dengan tambahan cerita masa lalu dia di DPRD yang sebenarnya nggak perlu untuk jawaban inti. Tapi di sisi lain, tambahan info ini bikin audiens paham lebih dalam soal latar belakang dan alasan dia jengkel.

Data 3

Ugro :*ya kalau saya melihat kalau Harun masiku ketangkap ini kira-kira alat Buktinya apa dulu ya kan ini kan biasanya gitu seperti saya dulu waktu menangkap perampok Bank CMB ini kalau perampok bank ini barang Buktinya apa uang enggak ada saksi enggak ada rekaman enggak ada jadi alat Buktinya adalah senjata M16 milik anggota brimob yang mereka dan mereka bawa lari kan gitu nah sekarang kalau Harun masin ketangkap kan ini ott Kalau enggak salah ya kan Nah ott ada dua menurut saya online online tangkap tangan atau offline tangkap tangan*(Rakyat Bersuara Episode Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju. Menit 10.38)

Tuturan Ugro dalam pernyataan ***“ya kalau saya melihat kalau Harun masiku ketangkap ini kira-kira alat Buktinya apa dulu ya kan ini kan biasanya gitu seperti saya dulu waktu menangkap perampok Bank CMB ini kalau perampok bank ini barang Buktinya apa uang enggak ada saksi enggak ada rekaman enggak ada jadi alat Buktinya adalah senjata M16 milik anggota brimob yang mereka dan mereka bawa lari kan gitu nah sekarang kalau Harun masin ketangkap kan ini ott Kalau enggak salah ya kan Nah ott ada dua menurut saya online online tangkap tangan atau offline tangkap tangan”*** merupakan pelanggaran maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice. Aiman pada saat itu menanyakan soal logika penangkapan Harun Masiku dan dugaan adanya politisasi, namun Ugro justru memberikan informasi tambahan yang terlalu panjang dan tidak relevan secara langsung dengan pertanyaan tersebut. Bagian seperti ***“seperti saya dulu waktu menangkap perampok Bank CMB ini”*** serta penjelasan detail tentang senjata M16 dan kondisi bukti dalam kasus lama adalah tuturan yang seharusnya tidak perlu diucapkan karena tidak berkontribusi terhadap inti pembicaraan. Informasi tersebut melebihi kebutuhan komunikasi, membelokkan fokus diskusi, dan dapat membingungkan lawan bicara. Oleh karena itu, tuturan ini termasuk dalam pelanggaran maksim kuantitas karena tidak memberikan kontribusi yang cukup, relevan, dan efisien dalam konteks percakapan.

Data 4

Yudi :*ya jadi memang ketika awal kasus itu justru saya lebih banyak berperan sebagai ketua wadah pegawai KPK saat itu di mana ketika ee terjadi ott salah satu penyidik yang menjadi penyelidik itu kemudian dipulangkan ke kepolisian yaitu waktu itu masih Kopol ya Ee Rosa purwেকti yang dia ee saat itu Ya kita tahu integritasnya dan sebagainya dan kemudian ya kita protes keras ya atas dipulangkannya Rosa prwobekti itu e bahkan* (Rakyat Bersuara Episode Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju. Menit 13.34)

Tuturan Yudi dalam pernyataan ***“justru saya lebih banyak berperan sebagai ketua wadah pegawai KPK saat itu di mana ketika ee terjadi OTT salah satu penyidik yang menjadi penyelidik itu kemudian dipulangkan ke kepolisian yaitu waktu itu masih Kopol ya Ee Rosa Purwobekti”*** merupakan pelanggaran maksim kuantitas dalam prinsip kerjasama Grice (1975). Pada saat itu, Aiman mengarahkan diskusi untuk menggali informasi mengenai penyidikan kasus Harun Masiku, namun Yudi justru mengalihkan fokus dengan menceritakan peran lamanya sebagai ketua wadah pegawai KPK serta menjabarkan pengalaman masa lalu terkait pemulangan salah satu penyidik, yakni Kopol Rosa Purwobekti. Meskipun pernyataan tersebut mungkin dimaksudkan untuk memberikan latar belakang atau membangun konteks, informasi

yang disampaikan terlalu panjang dan bersifat naratif, sehingga tidak memberikan jawaban yang ringkas, relevan, dan langsung mengenai pokok persoalan yang sedang dibahas. Bagian seperti **“justru saya lebih banyak berperan sebagai ketua wadah pegawai KPK”** dan penjabaran tentang penyidik yang dipulangkan merupakan tuturan yang seharusnya tidak diucapkan dalam konteks pertanyaan yang menuntut fokus pada penanganan kasus Harun Masiku. Yudi menyampaikan informasi tambahan yang tidak diminta dan kurang berhubungan langsung dengan inti topik, Hal ini tidak hanya memperpanjang penjelasan secara tidak perlu, tetapi juga berpotensi mengaburkan fokus audiens dari isu utama.

Data 5

Ugro :*lah kalau online tangkap tangan berarti alat buktinya ad rekaman-rekaman pembicaraan dan sebagainya ini harus ada Oke tapi kalau offline tangkap tangan Nah berarti ini sudah ada DPO tinggal ditangkap tangan saja itu offline berarti Nah kalau nangkap barum nasiku babinkamtimas seindonesia aja ada 86.000 diberi Surat enggak oleh KPK kepada kapori Mohon bantuan babinkamtimas seluruh Indonesia agar menangkap harun masiku.* (Rakyat Bersuara Episode Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju. Menit 13.34)

Tuturan Ugro dalam pernyataan **“lah kalau online tangkap tangan berarti alat buktinya ad rekaman-rekaman pembicaraan dan sebagainya ini harus ada Oke tapi kalau offline tangkap tangan Nah berarti ini sudah ada DPO tinggal ditangkap tangan saja itu offline berarti Nah kalau nangkap barum nasiku babinkamtimas seindonesia aja ada 86.000 diberi Surat enggak oleh KPK kepada kapori Mohon bantuan babinkamtimas seluruh Indonesia agar menangkap harun masiku”** menunjukkan adanya pelanggaran maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice. Dalam konteks ini, Aiman menanyakan soal upaya konkret dalam pencarian Harun Masiku, namun Ugro justru merinci jumlah personel Babinkamtibmas secara spesifik “86.000” dan menggambarkan prosedur teknis pengiriman surat kepada Kapolri. Penjabaran ini tidak menjawab secara langsung esensi pertanyaan, melainkan memberikan informasi tambahan yang kurang relevan dan tidak terlalu diperlukan. Bagian seperti **“Babinkamtibmas se-Indonesia aja ada 86.000”** merupakan tuturan yang seharusnya tidak perlu diucapkan karena melebihi kebutuhan komunikasi dan cenderung memperluas pembahasan secara tidak efektif. Informasi yang berlebihan ini memperlambat fokus percakapan dan tidak menambah pemahaman terhadap inti masalah, sehingga melanggar maksim kuantitas dengan memberikan kontribusi yang terlalu banyak dan tidak proporsional terhadap konteks.

Data 6

Ugro :*ya saya selama di polisi Enggak ada enggak bisa saya tanggap kalau penjat yang besar-besar kalau saya ketua KPK mungkin mudah mungkin ya tapi ya belum tentu juga kalau kita mau ya Mohon maaf ini sambil guyon ya. kenapa di Indonesia ini ada Hakim Agung ada Jaksa Agung Kenapa tidak ada polisi Agung* (Rakyat Bersuara Episode Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju. Menit 12.23)

Tuturan Ugro dalam pernyataan ***“ya saya selama di polisi Enggak ada enggak bisa saya tanggap kalau penjat yang besar-besar kalau saya ketua KPK mungkin mudah mungkin ya tapi ya belum tentu juga kalau kita mau ya Mohon maaf ini sambil guyon ya. kenapa di Indonesia ini ada Hakim Agung ada Jaksa Agung Kenapa tidak ada polisi Agung”*** mencerminkan pelanggaran maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice (1975). Pada dasarnya, maksim kuantitas mengharuskan penutur memberikan informasi yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih dari yang dibutuhkan dalam konteks komunikasi. Dalam hal ini, Aiman sebagai pewawancara sedang membahas isu serius terkait proses dan kendala penangkapan buronan politik, Harun Masiku. Namun, alih-alih memberikan tanggapan yang langsung, padat, dan relevan, Ugro justru membawa topik ke luar konteks pembahasan dengan menyisipkan pengalaman pribadi, anggapan pribadi seandainya menjadi Ketua KPK, serta candaan tentang ***“Polisi Agung”***. Tuturan Ugro yang ***“kalau saya ketua KPK mungkin mudah mungkin ya tapi ya belum tentu juga”*** dan terutama pada bagian ***“kenapa di Indonesia ini ada Hakim Agung ada Jaksa Agung Kenapa tidak ada Polisi Agung”*** adalah bentuk informasi yang tidak perlu, tidak relevan secara langsung, dan tidak memberikan kontribusi terhadap pemahaman audiens terhadap isu utama. Kalimat tersebut tidak menjawab pertanyaan secara substantif dan justru memperluas pembicaraan ke arah yang bersifat spekulatif dan humoris. Seharusnya, dalam menjawab pertanyaan mengenai kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus besar seperti Harun Masiku, Ugro cukup memberikan pandangan faktual atau pendapat yang relevan, misalnya menjelaskan hambatan teknis atau hukum yang dihadapi tanpa perlu membawa narasi humor atau asumsi pribadi.

Pembahasan

Dalam percakapan pada acara *Rakyat Bersuara* yang membahas kasus Harun Masiku, terdapat sejumlah tuturan dari narasumber yang menunjukkan adanya pelanggaran maksim kuantitas menurut prinsip kerja sama Grice (1975). Maksim kuantitas menekankan bahwa penutur harus memberikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan, agar percakapan berjalan efektif. Namun, pada data yang dianalisis, narasumber sering kali memberikan informasi tambahan yang melampaui kebutuhan jawaban inti. Boyamin, misalnya, dalam Data 1 dan 2 menyampaikan penjelasan panjang terkait sayembara iPhone serta pengalaman masa lalunya sebagai politisi Orde Baru. Walaupun tidak secara langsung menjawab pertanyaan, tambahan informasi tersebut berfungsi menekankan rasa frustrasi masyarakat dan mengkritisi adanya potensi politisasi dalam kasus Harun Masiku.

Hal serupa terlihat pada tuturan Ugro dalam Data 3, 5, dan 6. Ugro menjelaskan secara mendetail mengenai proses pembuktian kasus dengan menambahkan pengalaman pribadinya saat menangani perampokan bank, memberikan kritik terhadap mekanisme penangkapan Harun Masiku hingga menyebutkan jumlah personel Babinkamtibmas, bahkan menyisipkan candaan tentang ***“Polisi Agung”***. Informasi ini sebenarnya melebihi kebutuhan percakapan, tetapi secara pragmatis membantu memperjelas konteks, memperkuat argumen, sekaligus menghadirkan kritik lembaga hukum dengan cara yang lebih ringan. Sementara itu, Yudi dalam Data 4 mengalihkan fokus pembicaraan dari penyidikan Harun Masiku dengan menceritakan perannya sebagai ketua wadah pegawai KPK dan kasus pemulangan penyidik Rosa Purwobekti. Meskipun panjang dan tidak sepenuhnya relevan, penjelasan tersebut memberi konteks mengenai dinamika internal KPK pada saat kasus berlangsung.

Secara keseluruhan, keenam data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran maksim kuantitas tidak selalu menjadi hambatan komunikasi. Justru, dalam konteks diskusi publik seperti ini, pelanggaran tersebut memiliki fungsi pragmatis yang penting. Boyamin menggunakan strategi ini untuk menunjukkan emosi dan kritik politik, Ugro untuk memberikan ilustrasi, memperkuat argumentasi, dan menyampaikan kritik kelembagaan, sementara Yudi menambahkan konteks organisasi yang relevan. Dengan demikian, pelanggaran maksim kuantitas dalam percakapan ini tidak mengurangi kerja sama percakapan, melainkan memperkaya makna, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada audiens, serta menghadirkan dimensi emosional dan argumentatif dalam komunikasi publik.

Pelanggaran Prinsip Kerjasama Maksim Kuantitas

Maksim kuantitas adalah salah satu bagian penting dari prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh H.P. Grice (1975). Intinya, maksim ini menekankan bahwa saat kita berkomunikasi, informasi yang kita berikan harus pas tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu berlebihan. Kalau kita ngomong terlalu sedikit, lawan bicara bisa kebingungan atau salah paham karena informasi yang dia butuhkan nggak lengkap. Sebaliknya, kalau ngomong terlalu panjang dan banyak detail yang nggak relevan, justru bikin pembicaraan melebar dan nggak fokus pada inti masalah. Dalam percakapan sehari-hari, pelanggaran maksim kuantitas ini sering kita temui, misalnya ketika seseorang ditanya hal sederhana tapi jawabannya bertele-tele, atau sebaliknya, memberikan jawaban singkat yang bikin orang lain harus bertanya ulang untuk memahami maksudnya. Menariknya, pelanggaran ini nggak selalu salah; kadang orang sengaja memberikan informasi berlebih untuk menekankan sesuatu, menyindir, atau bahkan membuat suasana lebih cair. Jadi, memahami maksim kuantitas ini penting banget supaya kita bisa ngobrol dengan efektif dan pesan yang mau kita sampaikan bisa diterima dengan jelas tanpa bikin lawan bicara bingung atau salah tangkap.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada tuturan Boyamin dan Ugro, jelas keduanya sering ngomong panjang lebar dan akhirnya keluar dari batas informasi yang sebenarnya dibutuhkan. Ini bisa kita bilang sebagai pelanggaran maksim kuantitas dalam prinsip kerjasama Grice (1975), yaitu pada Boyamin. Dia awalnya cuma mau bilang kalau masih ada sayembara iPhone buat yang bisa nemuin Harun Masiku. Tapi dia malah nambahin cerita panjang mulai dari sejarah sayembara tahun 2020, hadiah buat yang nemuin Nurhadi, sampai bercanda soal "iPhone seri 20." Itu kan informasi tambahan yang nggak perlu, tapi dia sengaja nyampein buat nunjukin betapa lamanya kasus Harun Masiku ini berlarut-larut dan frustrasinya dia terhadap penegakan hukum.

Pada tuturan Ugro juga sama. Pas diminta pendapat tentang alat bukti penangkapan Harun, dia nggak langsung jawab *to the point*. Dia malah cerita dulu pengalaman masa lalunya nangkap perampok Bank CMB, ngasih detail barang bukti, dan lanjut bahas OTT online maupun offline. Bahkan dia nambahin kritik soal kenapa Babinkamtibmas nggak dilibatkan dan sempat bercanda soal jabatan "Polisi Agung." Semua ini jelas lebih dari informasi yang diminta. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, informasi berlebih ini bukan sekadar ngomong. Ada tujuannya. Boyamin pakai gaya berlebih untuk menekankan kritik terhadap lambannya penangkapan. Ugro ngasih cerita tambahan buat bikin orang paham bahwa menangkap buronan sebesar Harun Masiku itu kompleks dan banyak tantangan. Bahkan candaan "Polisi Agung" bisa dilihat sebagai kritik terselubung pada sistem hukum di Indonesia. Jadi, kesimpulannya,

walaupun mereka berdua melanggar maksim kuantitas karena ngomong lebih panjang dan detail dari yang dibutuhkan, cara itu justru dipakai untuk memperkuat pesan, menekankan kritik, dan bikin suasana diskusi lebih hidup. Pelanggaran maksim ini nggak bikin komunikasi gagal, malah jadi strategi komunikasi yang efektif untuk menunjukkan emosi, pendapat, dan pandangan mereka terhadap kasus Harun Masiku.

Daftar Pustaka

- Agustina, D., Nurhayati, S., & Maulidiyah, R. (2024). *Prinsip Kerja Sama dalam Komunikasi: Kajian Pragmatik*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Mubarak, M. (2020). Analisis Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice pada Talk Show Indonesia Lawyers Club. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 38(2), 121–134.
- Ananda, R. (2019). Pragmatik dan Prinsip Kerjasama dalam Interaksi Sosial. *Bahasa dan Sastra*, 14(1), 45–58.
- Astuti, P. (2021). Analisis Pelanggaran Maksim Percakapan dalam Acara Debat Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 100–115.
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaer, A. (2010). *Pragmatik: Teori dan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cutting, J. (2002). *Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students*. London: Routledge.
- Djajasudarma, F. (2013). *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauziyah, N., & Pranowo, A. (2022). Pelanggaran Prinsip Kerjasama Grice dalam Dialog Politik. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 7(1), 33–42.
- Grice, H. P. (1975). *Logic and Conversation*. In Cole, P., & Morgan, J. L. (Eds.), *Syntax and Semantics* (Vol. 3, pp. 41–58). New York: Academic Press.
- Hasanah, L. (2018). Implikatur dan Prinsip Kerjasama dalam Percakapan. *Bahasa dan Wacana*, 10(2), 211–226.
- Indrawati, S. (2020). Analisis Pelanggaran Maksim Kuantitas dalam Percakapan Guru dan Siswa. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(3), 79–88.
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Mey, J. L. (2001). *Pragmatics: An Introduction* (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parera, J. D. (2001). *Teori Pragmatik*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sinaga, H., & Dahnilsyah, D. (2018). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Wacana Politik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 15–28.
- Slutskiy, Y. (2021). Grice's Cooperative Principle and Communication Theory. *Journal of Pragmatics Research*, 3(2), 102–115.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijana, I. D. P. (1996). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Zhang, Y. (2020). Conversational Implicature and Cooperative Principle in Media Talk Shows. *International Journal of Linguistics*, 12(5), 55–66